

**ANALISIS PROFESIONALITAS PERSONIL BHAYANGKARA
OPERASIONAL PENYELIA PADA DIREKTORAT KEAMANAN NEGARA
BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI**

Disusun Oleh:

NAMA : ARTANTI RESDIANA
NPM : 2144021020
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

Tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr. A.P.)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2023**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Artanti Resdiana
NPM : 2144021020
Jurusan : Adminsitrase Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Analisis Profesionalitas Personil Bhayangkara
Operasional Penyelia (BOP) pada Direktorat
Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan
Polri.
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : Professionalism Analysis of Bhayangkara
Operasional Penyelia (BOP) at State and
Security Directorate of Intelligence and
Security Agency of Indonesian National Police

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. Ridwan Rajab, M.Si)

Pembimbing II



(Arifiani Widjayanti, S.P., M.Si.,
Ph.D.)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : ARTANTI RESDIANA
NPM : 2144021020
JURUSAN : ADMINSITRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
JUDUL TESIS : ANALISIS PROFESIONALITAS PERSONIL
BHAYANGKARA OPERASIONAL PENYELIA (BOP)
PADA DIREKTORAT KEAMANAN NEGARA BADAN
INTELIJEN KEAMANAN POLRI.

Telah mempertahankan tesis dihadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 6 November 2023
Pukul : 10.30 – 12.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Edy Sutrisno, M.Si :
Sekretaris : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd :
Anggota : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA :
Pembimbing I : Dr. Ridwan Rajab, M.Si :
Pembimbing II : Arifiani Widjayanti, S.P., M.Si., Ph.D. :



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Artanti Resdiana
NPM : 2144021020
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "Analisis Profesionalitas Personil Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) pada Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia" adalah benar keasliannya dan merupakan buatan dan hasil karya saya sendiri serta bukan hasil dari penelitian yang telah diajukan guna memperoleh suatu gelar akademik pada universitas ataupun lembaga yang sederajat. Bilamana pada kemudian hari penulisan tesis ini adalah hasil penjiplakan maupun plagiat atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab serta menerima sanksi menurut peraturan serta ketentuan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, November 2023

Pembuat Pernyataan


Artanti Resdiana

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas setiap berkat, hikmat, kekuatan, tuntutan dan penyertaanNya selama penyusunan penelitian ini sehingga saya dapat menyelesaikannya dalam rangka pemenuhan tugas akhir Program Magister Administrasi Pembangunan Negara konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur (MSDA) Angkatan Tahun 2021. Penelitian tugas akhir dengan judul “Analisis Profesionalitas Personil Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) pada Direktorat Keamanan Negara (Ditkamneg) Badan Intelijen Keamanan Polri”, diharapkan dapat bermanfaat guna menambah pengetahuan, wawasan dan manfaat akademis sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan profesionalitas. Selain itu, juga memberikan manfaat bagi organisasi khususnya Badan Intelijen Keamanan Polri secara bahan masukan kepada organisasi Polri khususnya Direktorat Keamanan Negara (Ditkamneg) untuk menentukan arah kebijakan dalam meningkatkan profesionalitas personil Polri berpangkat Perwira Pertama Polri pada Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.

Tujuan penelitian hasil penelitian ini adalah sebagai pemenuhan persyaratan memperoleh gelar Magister Terapan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur pada Politeknik STIA LAN Jakarta. Di dalam proses penyusunan hasil penelitian tugas akhir ini, saya menghaturkan rasa terimakasih dan hormat terbesar kepada **Bapak Dr. Ridwan Rajab, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Arifiani Widjayanti, S.P., M.S., Ph.D selaku Dosen Pembimbing II** yang begitu sabar, telaten membimbing, mengarahkan dan mengingatkan serta mendukung saya selama penyelesaian penyusunan hasil penelitian tugas akhir ini. Serangkaian rasa hormat, kagum dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya, juga saya haturkan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A., selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta beserta seluruh jajaran Dosen dan staf Program Magister Ilmu Administrasi Politeknik STIA LAN yang telah membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan dan atas bantuannya selama ini;

2. Tim Penguji Bapak Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si, Bapak Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd dan Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A pada sidang tesis yang telah memberikan saran-saran dan masukan yang berharga untuk penyempurnaan tesis ini;
3. Ibu Haryati, S.Pd, M.Pd dan Almarhum Bapak, Sunaryo Pribadi, M.Th, yang telah mengasuh, merawat dan membesarkan penuh cinta kasih dengan seluruh pengorbanan yang tidak terhitung, kiranya Allah Maha Kasih memberikan kesehatan, sukacita dan berkat yang melimpah;
4. Suami saya terkasih, Wisnu Mahendra, S.P., dan keluarga besar ku yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan penyusunan tesis ini;
5. Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Bapak Komjen Pol. Drs. Suntana, M.Si dan Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri, Bapak Irjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M, beserta seluruh Pejabat Utama khususnya Karorenmin Baintelkam Polri dan Karojianstra SSDM Kapolri, dan Wadir, Kasubdit dan para Kanit serta rekan-rekan Direktorat Keamanan Negara Baintelkam Polri, terimakasih atas dukungan dan kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan penelitian;
6. Letkol AD Agus Riyanto, BAIS TNI dan Bapak Dedy Sudrajat, Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI, yang telah berkenan menjadi salah satu key informan dari mitra kerja K/L;
7. Teman-teman satu kelas MSDA 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan yang sangat besar selama masa studi, kenangannya Insyaallah tidak bisa dilupakan, semoga silaturahmi kita tidak akan pernah terputus;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan moril, sehingga Tesis ini dapat selesai.

Hanya doa yang dapat peneliti panjatkan, semoga Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa membalas kebaikan, keberkahan dan kebahagiaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta perhatian yang tidak henti kepada peneliti.

Dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan Tesis ini. Semoga Tesis ini berguna untuk menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

November 2023

Artanti Resdiana



**POLITEKNIK
STIA LAN**
J A K A R T A
J A K A R T A

ABSTRAK

Analisis Profesionalitas Personil Bhayangkara Operasional Penyelia Pada Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri

Artanti Resdiana, Ridwan Rajab, Arifiyani Widjayanti

artantires.es2@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Profesionalitas personil BOP pada Direktorat Keamanan Negara menjadi prioritas dalam mewujudkan Intelijen Keamanan yang unggul, tajam dan terpercaya. Ketidakjelasan penempatan jabatan fungsional Bhayangkara Operasional Penyelia pada Direktorat Keamanan Negara. Aspek kinerja (*performance*), kompetensi, loyalitas dan akuntabilitas menurut peneliti menjadi aspek utama yang dapat mempengaruhi peningkatan profesionalitas para personil Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Intelijen Keamanan Polri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis permasalahan kesenjangan penempatan jabatan BOP dengan kualifikasi kurang sesuai kebutuhan direktorat operasional serta menyusun strategi guna meningkatkan profesionalitas personil BOP secara efektif. Menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan, observasi (pengamatan) yang dilakukan pada locus (lokasi) penelitian yaitu Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri serta wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Belum optimalnya profesionalitas BOP dipengaruhi oleh kinerja yang tidak didukung oleh kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural yang memadai untuk kebutuhan unit operasional intelijen keamanan. (2) Piranti lunak berupa kebijakan atau peraturan yang mendukung proyeksi pola karier dan jabatan fungsional pada direktorat operasional pada Intelijen Keamanan masih belum optimal. (3) Aspek kinerja, kompetensi, loyalitas dan akuntabilitas yang ditingkatkan menjadi penggerak utama meningkatnya profesionalitas personil Bhayangkara Operasional Penyelia pada Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri.

Kata kunci: ***kinerja; kompetensi; loyalitas; akuntabilitas dan profesionalitas.***

ABSTRACT

Analysis of Professionalism of Bhayangkara Personnel Operational at The State Security Directorate of Security Intelligence Agency of Indonesian National Police

Artanti Resdiana, Ridwan Rajab, Arifiyani Widjayanti

artantires.es2@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

The professionalism of BOP personnel at the Directorate of State Security is a priority in realizing superior, sharp and trustworthy Security Intelligence. Unclear placement of the functional position of Bhayangkara Operational Supervisor at the Directorate of State Security. According to researchers, the aspects of performance, competence, loyalty and accountability are the main aspects that can influence the increase in professionalism of Bhayangkara Operational Supervisor (BOP) personnel in carrying out the main tasks and functions of the National Police Security Intelligence.

This research aims to determine the results of an analysis of the problem of gaps in placement of BOP positions with qualifications that do not meet the needs of the operational directorate and to develop strategies to effectively increase the professionalism of BOP personnel. Using qualitative research methods through literature study, observations carried out at the research locus (location), namely the Directorate of State Security, the National Police Security Intelligence Agency and interviews.

The research results show that (1) BOP professionalism is not optimal yet, influenced by performance that is not supported by adequate technical, managerial and socio-cultural competence for the needs of the security intelligence operational unit. (2) Software in the form of policies or regulations that support the projection of career patterns and functional positions in the operational directorate of Security Intelligence is still not optimal. (3) Improved aspects of performance, competence, loyalty and accountability are the main drivers for increasing the professionalism of Bhayangkara Operational Supervisor personnel at the State Security Directorate of the National Police Security Intelligence Agency

Keywords: ***performance; competence; loyalty; accountability and professionalism***

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
LAMPIRAN	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi masalah	12
C. Rumusan Permasalahan	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian terdahulu	15
B. Tinjauan Kebijakan	32
C. Tinjauan Teoritis	37
D. Kerangka Pemikiran	67
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	71
A. Metode Penelitian	71
B. Teknik Pengumpulan Data	72
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	78
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Profil Lokus Penelitian.....	82

1. Badan Intelijen Keamanan Polri	82
2. Direktorat Keamanan Negara	90
B. Analisis Hasil Penelitian	93
1. Kesenjangan Jabatan dan Kualifikasi	96
2. Kualifikasi Personil Bhayangkara Operasional Penyelia	114
3. Strategi Peningkatan Profesionalitas Bhayangkara Operasional Penyelia pada Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri.....	131
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	144
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN	

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.2. Data jumlah personil Polri berdasarkan sumber pendidikan pembentukan Polri (sumber. Bagsumda rorenmin baintelkam Polri)
- Tabel 1.3. Data jumlah personil Polri berpangkat Perwira pertama, Perwira Menengah dan Perwira Tinggi berdasarkan sumber pendidikan dan pengembangan.
- Tabel 1.4. Data jumlah personil Polri berdasarkan sumber pendidikan umum mulai dari Bintara s.d. Perwira Tinggi.
- Tabel 1.5. Data jumlah personil Polri yang memiliki pendidikan kejuruan intelijen keamanan.
- Tabel 1.6. Data jumlah personil Polri berpangkat Perwira Tinggi s.d. Bintara/Tamtama sesuai DSP dan kondisi riil pada Perkap Nomor 6 Tahun 2017
- Tabel 1.7. Database personil pada Direktorat Keamanan Negara berdasarkan data pada Urtu Ditkamneg
- Tabel 3.1. Daftar key informan penelitian

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1. Struktur Organisasi pada Tingkat Markas Besar (Mabes) Polri menurut Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2022
- Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Intelijen Keamanan Polri menurut Perkap Nomor 6 Tahun 2017
- Gambar 4.2. Struktur Organisasi Direktorat Keamanan Negara pada SOTK Mabes Polri.
- Gambar 4.3. Daftar Susunan Personil dalam SOTK Mabes Polri, unsur Unsur Pimpinan, Urkeu, Taud dan Roanalisis.
- Gambar 4.4. Daftar Susunan Personil dalam SOTK Mabes Polri. Unsur Ro Analis dan Rorenmin.
- Gambar 4.5. Daftar Susunan Personil dalam SOTK Mabes Polri. Unsur Ro Analis dan Rorenmin.
- Gambar 4.6. Daftar Susunan Personil dalam SOTK Mabes Polri. Unsur Direktorat.
- Gambar 4.7. Daftar Susunan Personil Badan Intelijen Keamanan dalam SOTK Mabes Polri.

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir

Bagan 3.1. Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model)

Bagan 3.2. Skema Analisis Data dengan Triangulasi Metode



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Surat Permohonan Ijin Penelitian
3. Surat Telah Terlaksanakan Penelitian
4. Foto Kegiatan Wawancara Lapangan
5. Informan Kunci Penelitian
6. Transkrip Wawancara Informan



BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Dinamika perubahan sosial yang sangat pesat, serta tersiarnya beragam peristiwa kedaulatan hukum, HAM, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, keterbukaan dan akuntabilitas, telah memunculkan beragam tipe anyar dalam mempertimbangkan tujuan, tugas dan fungsi serta kewenangan dan komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga juga berdampak pada meningkatnya perbedaan desakan dan asa masyarakat kepada konkretisasi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Indonesia yang bersifat dinamis dan mengarah pada orang-orang yang mereka layani. Salah satunya adalah Badan Intelijen Keamanan Polri. Sebagai Satuan Kerja Operasional pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Keamanan Polri atau disingkat Baintelkam Polri bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan fungsi intelijen keamanan pada Polri mulai dari level Markas Besar (Mabes) Polri hingga tingkat Kepolisian tingkat Sektor (Polsek) di seluruh wilayah hukum Indonesia. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Bab 3 mengenai Tugas serta Wewenang Polri, Pasal 13 menjelaskan bahwa fungsi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum, mempertahankan supremasi hukum, serta menyediakan pengayoman, pengayoman, dan pelayanan kepada publik. Seluruh tugas dan wewenang tersebut diatas, wajib diselenggarakan oleh seluruh personil Polri baik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan (Perkabik) Polri dijelaskan dalam Bab I, Pasal 1 bahwa Badan Intelijen Keamanan Polri yang kemudian dalam penelitian ini disebut Baintelkam Polri merupakan satuan pengemban tugas utama Polri di bidang intelijen keamanan pada Markas Besar Polri. Sedangkan intelijen keamanan Polri atau Intelkam Polri ialah kegiatan intelijen yang diaplikasikan guna penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai

salah satu fungsi pemerintahan negara dalam mewujudkan keamanan dalam negeri. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan juga definisi intelijen sebagai usaha dan/atau kegiatan yang terorganisir dengan menerapkan metode tertentu guna melahirkan produk pengetahuan terkait masalah yang dijumpai, kemudian disajikan kepada pimpinan serta akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan tindakan atau perumusan kebijakan.

Hasibuan (2012:94) dalam tugas akhir yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Riau, mengemukakan pendapat tentang kinerja yang dinilai sebagai usaha individu yang dicapai selama melaksanakan tugas yang ditanggung sesuai kecakapan pengalaman, kesungguhan dan waktu yang bersangkutan. Penekanan terhadap hasil usaha/kerja yang diperoleh setiap orang selama menyelesaikan pekerjaan yang diterima merujuk pada standar yang telah ditentukan. Tentu saja, apa yang dikemukakan oleh Hasibuan tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan rangkaian tugas intelijen keamanan Polri, yang melibatkan proses deteksi awal, dikenal dengan istilah sistem peringatan dini". Aktivitas intelijen menjadi bagian integral dalam sistem peringatan dini, yang mengharuskan pembuat kebijakan memiliki pengetahuan lebih lanjut dalam melakukan upaya pencegahan atau peringatan dini. Tugas global intelijen untuk memobilisasi, menganalisis, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menghasilkan keputusan terbaik guna mencapai tujuan institusi. Namun, lebih lanjut, *Institute for Defense Location and Security Studies* (IDSPS) tahun 2008 perihal *General National Policy*, Jakarta, mengemukakan bahwa Badan Intelijen Keamanan memiliki tugas khusus, antara lain (1) memberikan analisis di bidang keamanan nasional, (2) menyediakan peringatan dini terhadap ancaman krisis, (3) memberikan asistensi dalam penanganan krisis domestik dan internasional melalui langkah deteksi (4) memberikan informasi untuk keperluan perencanaan keamanan nasional, (5) melindungi informasi rahasia dan (6) menyelenggarakan kegiatan kontra intelijen.

Hal senada diungkapkan terkait tugas intelijen keamanan dalam Jurnal Puslitbang Polri oleh Sumarjiyo tahun 2018, yang mengemukakan tiga bentuk kegiatan operasional Intelijen Keamanan Polri yaitu penyelidikan, pengamanan

dan penggalangan, seperti kutipan dari Saronto dan Karwita, 2001. Penyelenggaraan operasional Intelkam dilakukan bertujuan guna mengumpulkan informasi, melindungi objek/kegiatan tertentu dan suksesti terlaksananya tugas Polri lainnya. Kegiatan intelijen keamanan biasanya dilakukan secara publik atau tertutup.

Senada dengan yang disampaikan oleh Kunarto 1999:48, dalam Jurnal berjudul Optimalisasi Fungsi Satuan Intelijen Keamanan Polri yang ditulis oleh N. Nasirwan (2019) bahwa penyelidikan merupakan usaha melacak dan menggalang informasi. Kemudian dilanjutkan bahwa pengamanan merupakan usaha menjamin keselamatan suatu organisasi agar tidak menjadi sasaran musuh. Sedangkan bentuk kegiatan operasional intelkam ketiga adalah penggalangan, sebagai upaya membuat kondisi dan situasi yang bermanfaat bagi organisasi. Oleh karena itu, ruang lingkup kegiatan intelijen dan keamanan pada penyelenggaraan fungsi Polri diselesaikan dengan siklus mendahului, menyertai, dan mengakhiri di setiap operasi kepolisian yang telah dikerjakan Polri. Rangkaian siklus intelijen dalam pengumpulan, pengolahan bahan keterangan sebagai implementasi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen, merupakan kegiatan terintegrasi sampai dengan proses penyajian informasi kepada pimpinan Polri, baik dalam rangka deteksi dini maupun peringatan. bidang intelijen dan keamanan. mengembangkan dan menjalankan kepolisian agar hasilnya bermanfaat dalam pelaksanaan fungsinya, sesuai yang dijabarkan dalam Misi Polri (Pusdik Intelkam, 2008).

Dalam Program Prioritas Kapolri yang bertemakan Transformasi Polri menuju Presisi dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar utama, yaitu transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan, dan transformasi pengawasan. Keempat pilar tersebut masing-masing digambarkan sebagai transformasi organisasi yang meliputi struktur kelembagaan, tranformasi sistem dan metode organisasi, serta SDM kepolisian tingkat tinggi di masa 4.0, transformasi teknologi kepolisian modern (polisi 4.0). Setelah itu, Perubahan operasional dilakukan melalui peningkatan efektivitas pemeliharaan keamanan, ketertiban umum, efektivitas penegakan hukum, penguatan dukungan Polri pada masa penanganan Covid-19 dua tahun lalu, serta memberikan dukungan penuh terhadap keterwujudan Program Pemulihan

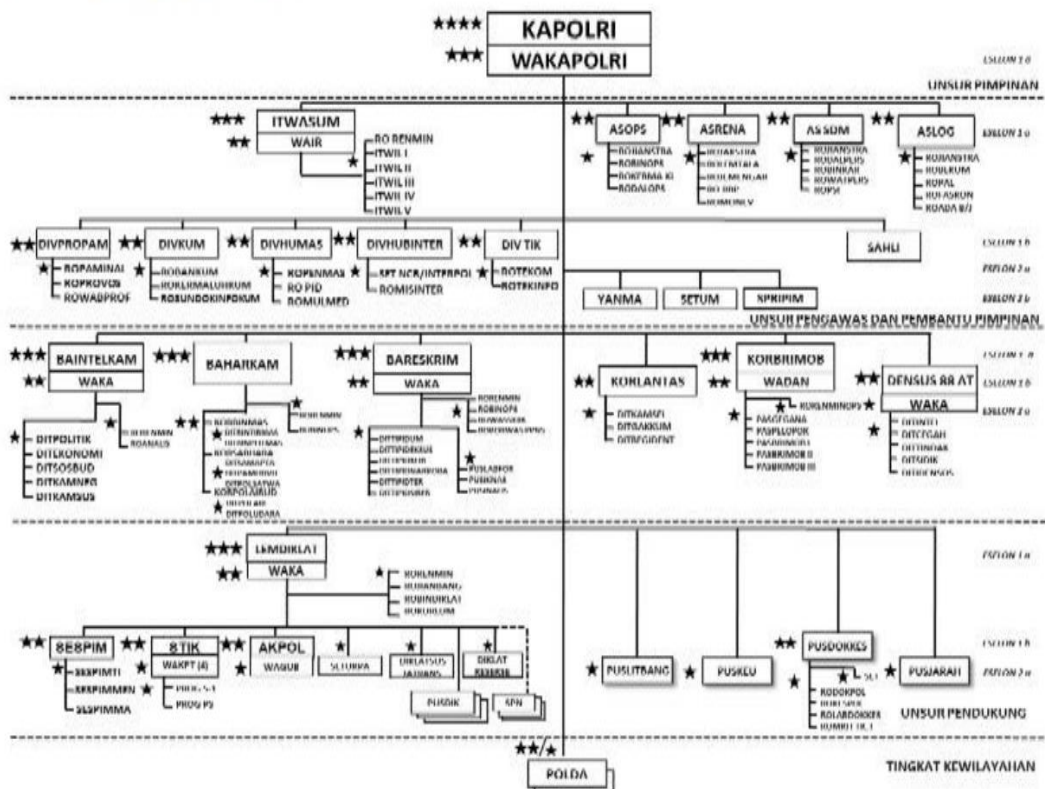
Perekonomian Nasional (PEN), menjamin keamanan nasional melalui program prioritas, dengan memperkuat manajemen guna mencegah terjadinya konflik sosial. Sedangkan pilar ketiga yaitu transformasi pelayanan, prioritas Kapolri yang Presisi berpusat pada menciptakan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, komunikasi publik yang semakin mantab serta pengawasan Pejabat yang memimpin terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan. Transformasi keempat, merupakan bidang pengawasan yaitu melalui peningkatan unsur pemeriksaan pimpinan terhadap setiap kegiatan, penguatan fungsi pengawasan serta pelibatan penyeliaan masyarakat melalui *public complain*. Program prioritas Presisi Kapolri sebagai program organisasi yang mengikutsertakan seluruh personil Polri untuk aktif berpartisipasi dalam mentransformasi dirinya menjadi lebih unggul di bidang pelayanan, operasional, pengawasan dan mendukung terwujudnya transformasi organisasi.

Transformasi organisasi yang disebutkan sebagai pilar perubahan Polri Presisi, diperkuat dengan terbitnya Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan keempat Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 perihal SOTK Mabes Polri, dalam lampiran pertama digambarkan struktur organisasi Baintelkam Polri yang berada di bawah Kapolri langsung. Dalam penjelesan yang disampaikan Peraturan tersebut diatas, tepatnya pada hal. 41 – 45, bahwa Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri mempunyai struktur organisasi yang berjenjang dimulai dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri (Kabaintelkam) berpangkat Komisaris Jenderal Polri hingga berpangkat Brigadir Dua (Bripda) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS non anggota Polri), dengan 5 (lima) Direktorat Operasional, 2 (dua) Biro, 4 (empat) Bidang. Dalam penjelasan pada halaman yang sama, secara spesifik menyampaikan bahwa salah satu Direktorat Operasional yang ada dalam struktur organisasi Baintelkam Polri adalah Direktorat Keamanan Negara (Kamneg). Terdiri dari 3 (tiga) Sub Direktorat di dalamnya yaitu Subdit 1 (Kejahatan Internal), Subdit 2 (Kejahatan Konvensional dan Konflik) dan Subdit 3 (Kejahatan Lintas Negara). Sebagai unsur operasional yang menangani Kejahatan Lintas Negara, Subdit 3 memiliki 4 (empat) unit khusus yang terdiri dari Unit 1 yang menangani Terorisme dan Radikalisme, Unit 2 terkait Kejahatan Orang Asing, Unit 3

husus menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perbatasan, sedangkan Unit 4 menangani Kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS
 BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI MABES POLRI



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Mabes Polri menurut Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2022

Dalam Peraturan Kapolri yang sama, disebutkan secara tegas bahwa Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri merupakan unsur penyelenggara tugas utama Polri di bidang Intelkam pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. Namun, dalam implementasi di lapangan, hingga saat ini struktur tersebut belum sepenuhnya mampu untuk mengakomodir tugas pokok fungsi dan peranan masing-masing personil Intelijen Keamanan Polri dalam mewujudkan visi dan misi organisasi secara utuh. Persoalan mendasar, disebabkan oleh tantangan tugas yang semakin kompleks menjadikan tupoksi Intelkam Polri semakin luas dan memerlukan penguatan struktur dan sumber daya manusia yang lebih efektif. Pilar tranformasi organisasi yang mendorong penataan kelembagaan, transformasi sistem dan metode organisasi, sumber daya manusia Polri yang unggul di masa 4.0, perubahan teknologi kepolisian modern sebagai landasan dasar sumber daya di tataran operasional salah satunya merupakan Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP). Sumber daya manusia Polri yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan operasional, akan berdampak terhadap pola peranguhan visi dan misi organisasi, yaitu Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri. Adapun data terkait personil Baintelkam Polri yang telah memiliki pendidikan umum serta mengikuti pendidikan pengembangan ataupun kejuruan, sebagaimana terlampir dibawah ini:

NO.	GOLONGAN PANGKAT	JUMLAH	AKPOL	SIPSS	SEBA	KET.
1.	PATI	47	47	-	-	
2.	PAMEN	234	148	35	51	
3.	PAMA	215	49	22	144	
4.	BINTARA	182	-	-	182	
JUMLAH		678	244	57	377	

Tabel 1.2 Sumber: Bagsumda Baintelkam Polri. Personil/anggota Polri berdasarkan sumber pendidikan pembentukan Polri

NO	GOLONGAN PANGKAT	JML	LEMHA NAS	DIKLAT PIM I	SES PATI	SES PIM	PTIK/STIK	SESPIMMA	SIP	AGOL
1.	PATI	47	12	0	28	7	-	-	-	-
2.	PAMEN	234	11	3	11	12	9	97	27	29
3.	PAMA	178	-	-	-	-	-	-	10	15
JUMLAH		459	23	3	39	19	9	97	37	44

Tabel 1.3. Sumber: Bagsumda Baintelkam Polri. Personil/anggota Polri berdasarkan sumber pendidikan pengembangan Polri

Sedangkan berdasarkan kualifikasi pendidikan umum sebelum atau setelah personil Polri itu aktif sebagai anggota Polri, adalah sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini:

NO	PANGKAT	JENIS PENDIDIKAN					JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	SMA	
1.	PATI	5	31	11	0	0	47
2.	KOMBES POL	4	62	8	0	72	146
3.	AKBP	1	16	14	2	14	47
4.	KOMPOL	1	9	16	1	14	41
5.	AKP	0	6	13	0	13	32
6.	INSPEKTUR	0	14	61	16	92	183
7.	BA	0	6	37	0	139	182
JUMLAH		11	144	160	19	344	678

Tabel 1.4. Sumber: Bagsumda Baintelkam Polri. Personil/anggota Polri berdasarkan sumber pendidikan umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam rangka memajukan profesionalisme pembinaan karir, pengintegrasian penyelenggaraan mutu tugas personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, jabatan fungsional Anggota Polri perlu dibentuk. Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman tiga Peraturan Presiden di atas, jabatan fungsional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah jabatan yang mewakili tugas, tanggung jawab, otoritas, dan hak personil satuan kerja Polri yang mengemban tugasnya dengan sempurna dan bertanggungjawab.

Penyelesaian tugas dilandaskan kualifikasi jabatan, keahlian, keterampilan tertentu serta bersifat independen. Pasal 2 secara jelas menyatakan bahwa kriteria jabatan fungsional anggota Polri meliputi penguasaan metodologi, teknik analisis, dan tata kerja berdasarkan kaidah keilmuan dan/atau keterampilan tertentu yang bersertifikat, taktik, dan teknik. Selain itu, kriteria etika profesi diatur oleh Kapolri dengan jenjang jabatan yang ditata berazaskan keahlian dan keterampilan, juga menjadi penekanan dalam Pasal 2.

Dalam hal ini, Bhayangkara Operasional Penyelia yang menjadi rumpun jabatan fungsional operasional pelaksana tugas pokok Intelijen Keamanan Polri, adalah jabatan tingkat keterampilan fungsional yang tugas pokok dan fungsinya membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja pejabat fungsional bawahan yang memerlukan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional untuk mendukung penunjang keahlian multidisiplin tingkat kedua. Inspektur hingga Wakil Komisariss Polisi. Dalam hal ini, pelatihan profesional sebagai tolok ukur kemampuan intelijen yang harus dimiliki oleh seluruh anggota Polri di Badan Keamanan dan Intelijen Polri sangatlah penting. Namun, berdasarkan data yang disampaikan oleh Bagian Sumber Daya Manusia Baintelkam Polri, seperti dibawah ini:

NO	GOLONGAN PANGKAT	KEJURUAN INTEL
1.	PATI	18
2.	PAMEN	195
3.	PAMA	75
4.	BINTARA	145
JUMLAH		443

Tabel 1.5. Sumber: Bagsumda Baintelkam Polri. Personil/anggota Polri berdasarkan sumber pendidikan kejuruan intelijen

Berteraskan tabel diatas, personil Polri berpangkat Bintara (golongan 2) yang sudah mengikuti pendidikan kejuruan intelijen berjumlah 32,7%,

sedangkan Perwira Pertama (Inspektur Dua s.d. Ajun Komisaris Polisi) hanya 16,93% dari total jumlah seluruh personil Polri yang sudah mengikuti pendidikan. Kedua level pangkat tersebut diatas, merupakan personil Polri yang mengampu tugas operasional. Hal ini tentu saja menjadi kendala karena dari total level pelaksana operasional yaitu Pama (Perwira Pertama) yaitu Ipd dan Iptu yang menduduki jabatan fungsional sebagai Bhayangkara Operasional Penyelia pada Direktorat di Baintelkam Polri hanya 42% dari total jumlah 178 Pama yang ada dalam Daftar Susunan Personil (DSP) menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Mabes Polri.

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017 tersebut, kriteria seorang anggota Polri dalam rumpun jabatan operasional adalah memiliki pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang jabatan ilmu pengetahuan dan berpangkat Inspektur Dua Polisi hingga Ajun Komisaris Polisi. Sesuai dengan Pertelaahan Tugas Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor 2 Tahun 2020, hal 201 Bagian Ketigabelas Pasal 275 tentang Ditkamneg (Direktorat Keamanan Negara) bertanggungjawab mengadakan penyelidikan, pengamanan serta penggalangan dan kontra intelijen akan beranekaragam potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata di bidang Keamanan Negara, selain menyiapkan dan menentukan unsur-unsur keterangan, target operasi di bidang Keamanan Negara. Secara spesifik, pada Pasal 307, Direktorat Keamanan Negara memiliki Subdit Kejahatan Lintas Negara yang dipimpin oleh seorang Kasubdit berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) menduduki jabatan 2B2, bertanggungjawab untuk mengajukan pertimbangan dan saran kepada Direktur Keamanan Negara sesuai dengan lingkup sasaran tugas yaitu terorisme, kejahatan terkait orang asing, pengamanan VVIP/VIP, kejahatan perbatasan, perdagangan manusia, perompakan laut dan kejahatan dunia maya. Selain itu, tugas Subdit Kejahatan Lintas Negara juga adalah menetapkan program kerja Direktorat Keamanan negara dan yang terutama adalah mengerjakan aktifitas operasional intelijen yang mencakup seluruh kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta melakukan deteksi serta identifikasi terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata sesuai lingkup tugasnya.

Pada Pasal 311, seorang Kepala Unit (Kanit) 2 pada Subdit Kejahatan Lintas Negara, bertugas untuk memimpin dan mengendalikan anggota unit dalam pelaksanaan kegiatan intelijen serta melakukan deteksi, identifikasi dan assesmen terhadap kerawanan dalam bidang kejahatan terkait orang asing, pengamanan VVIP/VIP serta mengungkap jaringan terhadap orang asing sebagai pelaku kejahatan. Secara structural, seorang Kanit akan dibantu oleh seorang Perwira Unit (Panit) dan Bintara Unit (Banit).

Namun, kondisi yang sebenarnya, personil BOP juga bertanggungjawab untuk mengerjakan seluruh tugas operasional unit. Sebagai rumpun jabatan fungsional keterampilan, dan bukan pemangku jabatan struktural, personil BOP justru berkontribusi besar dalam kinerja sebuah unit operasional pada Direktorat Keamanan Negara (Ditkamneg). Berdasarkan data pada Direktorat Kamneg saat ini, terdapat 33 (tiga puluh tiga) Perwira Pertama/PNS yang menduduki jabatan sebagai BOP dan BAP (Bhayangkara Administrasi Penyelia), dengan total jumlah Personil pada Direktorat Kamneg yaitu 89 orang Personil. Apabila melihat dari definisi tentang penilaian kinerja yang disampaikan Hodgetts dan Kuratko, latar belakang pendidikan intelijen yang dimiliki oleh personil Pama yang mengampu jabatan sebagai Bhayangkara Operasional Penyelia, belum dapat sepenuhnya mendukung kinerja unit pada Direktorat Keamanan Negara Baintelkam. Ketidakmerataan personil Polri yang menjabat sebagai BOP antar setiap unit, pendidikan kepolisian dan pendidikan umum yang belum optimal sesuai dengan kebutuhan unit, perilaku personil dalam unit terutama BOP yang tidak sesuai dengan profil jabatan serta kinerja personil unit khusus BOP yang seharusnya terampil dalam tataran operasional unit masih kurang sehingga berpengaruh terhadap kinerja unit. Selain itu, jumlah personil level Inspektur Dua (Ipda) hingga Ajun Komisaris Polisi (AKP) sebagai rumpun jabatan fungsional operasional keterampilan (BOP) pada Badan Intelijen Keamanan termasuk Direktorat Keamanan Negara, tidak sesuai Daftar Susunan Personil (DSP) seperti yang tercantum dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Baintelkam Polri seperti terlampir dalam tabel berikut ini.

SOTK BAINTELKAM POLRI BERDASARKAN PERKAP NOMOR 6/2017		
UNSUR PIMPINAN	DSP	RIIL
Komjen	1	3
Irjen	1	9
Brigjen	7	35
Kombes	31	146
AKBP	85	47
Kompol	87	41
Perwira Pertama (AKP)	6	32
IPDA/IPTU	0	128
BA/Ta	248	182

Jumlah kekuatan personil Polri berpangkat Ipda/Iptu tanpa jabatan structural (BOP) yaitu 128 orang sedangkan menurut DSP, tidak ada.

Tabel 1.6. Sumber: Bagsumda Baintelkam Polri. Personil/anggota Polri berdasarkan sumber pendidikan umum

Jabatan dalam unit yang seharusnya diisi oleh personil Polri dengan jabatan struktural (Panit/Banit), ternyata karena keterbatasan kuota jabatan struktural dan jumlah Pama (Ipda sd AKP) yang berlebih malah yang menduduki jabatan fungsional sebagai Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) sehingga yang diberdayakan adalah personil BOP untuk memberbantuan kebutuhan operasional unit. Sedangkan khusus jumlah personil pada Direktorat Keamanan Negara (Ditkamneg) yang berpangkat AKP hingga Ipda saat ini adalah 11 (sebelas) orang berpangkat Ipda, 18 (delapan belas) orang berpangkat Iptu dan 3 (tiga) orang berpangkat AKP, yang menjabat rumpun jabatan operasional keterampilan atau Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP), seperti terlampir dalam tabel di bawah ini.

JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KURANG
PIMPINAN	DIREKTUR	BRIGJEN POL	II A	1	-
	WADIR	KOMBES POL	II B	1	-
URTU	KAURTU	KP/PNS IVA/B	III B	1	-
	BAMIN/BANUM	BA/PNS II/I		1	1
SUBDIT	KASUBDIT	KOMBES POL	II B	3	-
	KANIT	AKBP/KOMPOL	III A	10	2
	PANIT	KP/AKP	III B	8	4
	KAURMIN	PNS IVA/B	III B	1	2
	BANIT	BA	-	19	29
	BANUM	PNS II/I	-	3	3
				48	41

Jumlah riil personil Ipda/Iptu/PNS menjabat BOP/BAP = 33 orang

Iptu: 11 orang; Ipda: 18 orang; Ba: 2 orang; PNS: 2 orang

Tabel 1.7. Sumber: Database Urtu Ditkamneg Baintelkam.

Dalam beberapa tabel diatas, terlihat melalui data yang disampaikan bahwa kesenjangan jumlah personil Perwira Pertama (Pama) Polri dengan ketersediaan jabatan selain fungsional dalam struktur organisasi yang sudah ada, belum sepenuhnya terakomodir. Pengakuan terhadap level kepangkatan Pama, mempengaruhi profesionalitas dari personil itu sendiri. Bahkan ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kurangnya akuntabilitas individu, loyalitas yang tidak merata dimiliki oleh setiap individu personil Pama berpengaruh terhadap kinerja individu, unit dan organisasi. Kemudian pada akhirnya, profesionalitas seluruh komponen menjadi diragukan, Di lain sisi, kebutuhan akan personil BOP yang professional semakin tampak dalam unit operasional yang ada karena seharusnya personil berpangkat Perwira Pertama yang bertugas dalam sebuah unit operasional intelijen keamanan seharusnya memiliki rekam jejak jabatan dan penugasan di bidang yang sama, namun yang terjadi malah sebaliknya. Masih terdapat personil yang menduduki jabatan BOP pada unit operasional intelijen keamanan, belum memiliki pengalaman bekerja pada fungsi intelijen keamanan. Bukan hanya rekam jejak penugasan, namun ternyata masih terdapat personil Perwira Pertama yang menduduki jabatan fungsional BOP tidak memiliki kompetensi di bidang intelijen keamanan dalam pembinaan kariernya, dan kesejangan inilah yang menjadikan kurang optimalnya profesionalitas personil BOP pada Direktorat Keamanan Negara.

Dengan bertambahnya beban kerja yang tinggi serta rentang kendali yang juga semakin kompleks, kebutuhan akan profil Bhayangkara Operasional Penyelia pada Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri dengan kompetensi, perilaku, kinerja yang unggul menjadi hal yang prioritas guna meningkatkan profesionalitas individu maupun organisasi.

Dari uraian tersebut maka peneliti bermaksud untuk menggarap penelitian berjudul **"ANALISIS PROFESIONALITAS PERSONIL BHAYANGKARA OPERASIONAL PENYELIA PADA DIREKTORAT KEAMANAN NEGARA BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI."**

B. Identifikasi Masalah

Beranjak kerangka persoalan dalam uraian tersebut diatas, peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat kesenjangan penempatan jabatan Bhayangkara Operasional pada Direktorat operasional berdasarkan jumlah riil personil.
2. Adanya kualifikasi yang kurang sesuai pada jabatan Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) di Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri.
3. Belum sesuaianya kualifikasi personil yang menduduki jabatan fungsional Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) di Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri.
4. Kinerja personil Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) di lingkungan Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri belum sesuai dengan kebutuhan operasional.
5. Masih kurang optimalnya profesionalitas personil Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) pada unit di Direktorat operasional.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut diatas, bisa dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu

1. Bagaimana permasalahan kesenjangan dalam penempatan jabatan bagi personil Intelijen Keamanan Polri di tingkat Perwira Pertama?
2. Bagaimana kualifikasi personil Bhayangkara Operasional Penyelia saat ini pada Direktorat Keamanan Negara?
3. Bagaimana strategi meningkatkan profesionalitas personil Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) sebagai rumpun jabatan operasional keterampilan pada Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui hasil analisis permasalahan kesenjangan penempatan jabatan bagi personil Polri berpangkat Ipda s.d. AKP dengan kualifikasi kurang sesuai kebutuhan direktorat operasional.
2. Mengetahui kualifikasi jabatan fungsional terampil, BOP yang sesuai dengan kebutuhan direktorat operasional.
3. Menyusun strategi untuk meningkatkan profesionalitas personil Bhayangkara Operasional Penyelia (BOP) dan berpangkat Perwira Pertama bagi Direktorat Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri yang efektif.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan serta dimanfaatkan berbagai pihak, baik secara akademis maupun bagi Direktorat Keamanan Negara (Ditkamneg) Badan Intelijen Keamanan Polri (Baintelkam Polri):

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini bisa dipakai guna meningkatkan wawasan, pengetahuan dan informasi serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan profesionalitas.

2. Manfaat Praktis bagi Direktorat Keamanan Negara (Ditkamneg) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri

Manfaat praktis bagi Direktorat Keamanan Negara Baintelkam Polri dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan kepada organisasi Polri khususnya Direktorat Keamanan Negara (Ditkamneg) untuk menentukan arah kebijakan dalam meningkatkan profesionalitas personil Polri berpangkat Perwira Pertama Polri pada Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.

F. Manfaat bagi Peneliti

Manfaat untuk peneliti ialah memperbanyak referensi wawasan dan pengetahuan perihal profesionalitas personil Polri.